



Bahtiar Purnomo <bahtiar.purnomo@gmail.com>

Surat Aspirasi Rakyat Indonesia

Bahtiar Purnomo <bahtiar.purnomo@gmail.com>

Mon, Oct 6, 2025 at 1:06 PM

To: bag_dumas@dpr.go.id

Surat Aspirasi Rakyat Indonesia

Perihal: Dampak Kebijakan ESDM terhadap Pekerja SPBU Swasta

Kepada Yth.

Ketua dan Anggota Komisi VI & Komisi VII DPR RI
di Tempat

Dengan hormat,

Saya, rakyat kecil dengan penghasilan setara UMR, menyampaikan aspirasi dan keluhan atas kondisi yang menimpa kami para pekerja di SPBU swasta (Shell & BP) akibat kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM melalui Bapak Bahlil dan Bapak Laode.

Berdasarkan informasi dari pemilik SPBU tempat kami bekerja, saat ini produk gasoline Shell tidak diperkenankan lagi untuk didistribusikan karena HABIS DARI PUSAT. Akibatnya, SPBU hanya dapat menjual produk bengkel dan toko makanan saja, sehingga banyak dari kami buruh dan staf SPBU mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Bagi kami rakyat kecil, keputusan ini sangat memberatkan. Jika negara ingin menempuh langkah nasionalisme dalam sektor energi, tentu kami mendukung selama sesuai koridor. Namun yang terjadi justru kebijakan yang tergesa-gesa, tidak memikirkan dampak ke akar rumput, dan terasa berlebihan hingga menjurus pada radikalisme nasionalisme (chauvinisme) yang salah arah.

Korban dari kebijakan ini bukan hanya para pengguna kendaraan (end-customer) yang kehilangan pilihan produk gasoline (dipaksa menggunakan Pertamina), tetapi juga ribuan pekerja SPBU yang menggantungkan hidup dari operasional harian. Jika dihitung, terdapat sekitar 12 pekerja di PHK per SPBU x 400 SPBU (Shell & BP secara nasional) = 4.800 kepala keluarga yang kini kehilangan penghasilan. Bayangkan setiap kepala keluarga memiliki 2 orang anak dan 1 istri, sehingga hampir 20.000 kepala yg bingung mau makan apa besok. Belum lagi para vendor, kontraktor, pemilik usaha, dan pelaku rantai pasok lainnya yang ikut terdampak. Hal ini jelas berlawanan dengan visi pemerintah, khususnya Bapak Wakil Presiden Ghibran yang menargetkan pembukaan 19 juta lapangan kerja baru di kampanye beliau dan pengurangan tingkat pengangguran.

Kebijakan ini berpotensi meningkatkan pengangguran, memperburuk kondisi sosial, dan bahkan bisa memicu kriminalitas di masyarakat akibat tekanan ekonomi. Sepertinya tingginya pembegalan, perampokan, pencurian, dll.

Kami juga membaca di berbagai pemberitaan nasional bahwa alasan pemerintah adalah neraca impor-ekspor yang dianggap sudah melewati batas (import BBM swasta sudah 110%). Menurut hemat kami, alasan tersebut tidak tepat. Solusi logis bukanlah menahan distribusi produk asing perusahaan swasta, melainkan meningkatkan ekspor nasional agar neraca kembali seimbang. Kebijakan yang ada saat ini justru menekan ekonomi rakyat bawah, bukan memperkuat. Padahal dengan swasta memasukkan import mereka hal ini akan membantu juga devisa negara sebagai pemasukan import devisa Neraca.

Dengan ini, kami memohon kepada Komisi VI dan VII DPR RI untuk:

1. Mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri ESDM (Bapak Bahlil dan Bapak Laode) guna mengklarifikasi dan meminta solusi atas kebijakan ini.
2. Memperjuangkan hak kami rakyat kecil, khususnya pekerja yang terkena PHK akibat kebijakan ini.
3. Memastikan bahwa kebijakan energi nasional sejalan dengan tujuan menciptakan lapangan kerja, bukan malah menutupinya.

Kami tidak minta macam-macam, kami hanya ingin bantuannya agar pekerjaan kami juga jadi tidak dirusak seperti ini, kami tidak butuh posisi direktur atau komisaris, kami hanya minta pekerjaan kami sebagai buruh harian SPBU tidak diacak-acak seperti ini.

Demikian aspirasi ini kami sampaikan. Besar harapan kami DPR RI dapat menjadi perpanjangan tangan rakyat yang sedang terzolimi oleh kebijakan yang tidak berpihak kepada kami.

Atas perhatian dan tindak lanjutnya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Atas nama rakyat kecil yang kehilangan pekerjaan karena kebijakan ESDM

Nama : Bahtiar

Pekerja SPBU Swasta